



LAPORAN HASIL EVALUASI VISI MISI KEILMUAN

PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN CURUP



Laporan Hasil Evaluasi Visi Misi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup

Disusun Oleh:

Tim Pengarah	Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
	Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
	Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., M.M.
	Dr. Nelson, M.Pd.I.
	Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
	Dr. Busman Edyar, S.Ag. M.A
	Dr. Nurjannah, M.Ag

Tim Penyusu n	David Aprizon Putra, S.H., M.H
	Dr. Mabursyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI
	Musda Asmara, M.A
	Habiburrahman, S.HI., M.H
	Tomi Agustian, M.H
	Safitridia Arinda, M.A.P
	Ranaswijaya, S.E.I., M.E.

Tanggal: 20 September, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Evaluasi Visi Misi Keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup ini dapat diselesaikan. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman sistematis untuk mengukur relevansi, koherensi, dan implementasi dari visi dan misi keilmuan yang menjadi landasan strategis program studi.

Keberadaan visi dan misi keilmuan yang relevan dan terimplementasi dengan baik adalah kunci utama bagi program studi untuk menghadapi dinamika pendidikan tinggi yang terus berubah. Laporan ini hadir sebagai wujud komitmen kami dalam menjalankan proses evaluasi mandiri yang berkelanjutan, guna memastikan bahwa setiap langkah akademik, penelitian, dan pengabdian yang kami lakukan senantiasa sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, alumni, maupun stakeholder eksternal. Masukan, data, dan partisipasi aktif dari semua pihak telah menjadi fondasi yang kuat bagi validitas temuan dalam laporan ini.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga, memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis data, serta menjadi panduan bagi perumusan strategi perbaikan dan pengembangan program studi di masa mendatang. Semoga hasil evaluasi ini dapat mengantarkan Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Curup, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Evaluasi.....	1
B. Tujuan Evaluasi	2
C. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
BAB II VISI MISI KEILMUAN	3
A. Visi Keilmuan	3
B. Misi Keilmuan Prodi.....	3
C. <i>Body of Knowledge</i> Program Studi.....	3
D. Profil Lulusan.....	3
E. Capaian Pembelajaran	4
BAB II METODE EVALUASI	7
A. Kriteria Evaluasi	7
B. Metode	8
C. Sumber Data	8
BAB III TEMUAN DAN HASIL EVALUASI	9
A. Karakteristik Reponden.....	9
B. Sumber Informasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan	10
C. Analisis Relevansi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	14
D. Analisis Koherensi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	16
E. Analisis Implementasi Visi Misi	17
F. Analisis Dampak Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	22
G. Pembahasan Temuan (Analisis SWOT)	24
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi Perbaikan.....	30
LAMPIRAN	31
A. Kisi Kisi & Angket survei (Instrumen Evaluasi Visi Keilmuan Prodi)	31
B. Hasil Validasi Instrumen.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Distribusi status responden.....	9
Tabel 3. 2 Statistik deskriptif aspek informasi visi keilmuan yang memadai	10
Tabel 3. 3 Media Sumber Informasi Dekripsi Visi Keilmuan Prodi Prodi Hukum Tata Negara.....	11
Tabel 3. 4 Statistik deskriptif tingkat pemahaman visi keilmuan prodi.....	12
Tabel 3. 5 Kesesuaian Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara yang Dirumuskan Secara Tepat....	14
Tabel 3. 6 Koherensi Visi Keilmuan Prodi terhadap tridarma PT	16
Tabel 3. 7 Implementasi Visi Keilmuan Sebagai Acuan Kegiatan Akademik	17
Tabel 3. 8 Implementasi Visi Keilmuan Sebagai Acuan Kegiatan Akademik.....	18
Tabel 3. 9 Implementasi Visi Keilmuan tercermin dalam suasana akademik.....	19
Tabel 3. 10 Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	20
Tabel 3. 11 Tindak Lanjut Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara.....	21
Tabel 3. 12 Tindak Lanjut Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	22
Tabel 3. 13 Matriks SWOT Temuan Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Distribusi Karakteristik Responden.....	9
Gambar 3. 2 Infomasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara yang memadai.....	10
Gambar 3. 3 Frekuensi Media Informasi.....	11
Gambar 3. 4 Tingkat Pemahaman Visi Misi	12
Gambar 3. 5 Perbandingan Informasi yang terima dengan tingkat pemahaman visi keilmuan.....	13
Gambar 3. 6 Grafik hasil analisis survei evaluasi visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara.....	15
Gambar 3. 7 Koerensi Visi Keilmuan dengan Trdharma PT	16
Gambar 3. 8 Wujud Implementasi Visi Keilmuan dalam Kegiatan Akademik.....	17
Gambar 3. 9 Visi Keilmuan Tercermin Dalam Proses Pelayanan Akademik Dan Administratif	18
Gambar 3. 10 Visi Keilmuan Prodi tercermin dalam Suasana Akademik.....	19
Gambar 3. 11 Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara	20
Gambar 3. 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara.....	21
Gambar 3. 13 Urgensi Pembaharuan Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Visi dan misi merupakan landasan fundamental sekaligus kompas strategis yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, visi dan misi berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum, perumusan kebijakan akademik, pelaksanaan penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Visi menggambarkan orientasi jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi menjabarkan strategi operasional untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kejelasan visi dan misi, program studi memiliki arah yang konsisten, mampu menjaga identitas keilmuan, serta memastikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan bangsa dan masyarakat global.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan kebutuhan dunia kerja, relevansi visi dan misi perlu diuji secara berkala. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan dinamika sosial dan kebijakan pendidikan, visi dan misi program studi dituntut untuk adaptif dan responsif. Agar tetap relevan, evaluasi berkala perlu dilakukan, tidak hanya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dipahami serta diinternalisasikan oleh sivitas akademika, tetapi juga untuk menilai kesesuaian dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, serta harapan stakeholders. Evaluasi ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas akademik, memastikan bahwa setiap langkah program studi sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan mandat dari berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun institusi. Secara nasional, landasan utamanya adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mengharuskan setiap program studi untuk memiliki, menyusun dan melaksanakan kurikulum berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang terukur serta mengevaluasi standar mutu lulusan. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Di tingkat institusi, Universitas Negeri Makassar telah menetapkan kebijakan SPMI yang mengatur mekanisme evaluasi, sehingga evaluasi visi dan misi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian integral dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan.

Lebih jauh, evaluasi visi dan misi Prodi Hukum Tata Negara dapat dianalisis melalui kerangka **input–proses–output–outcome–impact**: **Input** mencakup kesiapan sumber daya manusia, mahasiswa, kurikulum, dan sarana-prasarana yang selaras dengan arah visi dan misi. **Proses** meliputi implementasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis visi keilmuan program studi. **Output** terlihat dari capaian pembelajaran lulusan (CPL), kualitas penelitian, serta kontribusi pengabdian yang

dihasilkan. **Outcome** mencerminkan kompetensi lulusan, reputasi akademik, dan daya serap alumni di dunia kerja sesuai kebutuhan stakeholders. **Impact** menegaskan kontribusi jangka panjang program studi dalam menjawab tantangan pendidikan, memperkuat peran kelembagaan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Dengan kerangka ini, evaluasi visi dan misi tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan juga menjadi refleksi menyeluruh terhadap kualitas, relevansi, dan keberlanjutan program studi dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

B. Tujuan Evaluasi

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa visi dan misi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup berfungsi secara efektif sebagai panduan strategis. Secara lebih spesifik, evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Mengukur kesesuaian visi dan misi dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan di era global.
2. Menganalisis konsistensi antara visi dan misi dengan elemen-elemen kurikulum, profil lulusan, dan capaian pembelajaran.
3. Mengukur sejauh mana visi dan misi telah diinternalisasi dan diwujudkan dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Menyusun rekomendasi yang terukur dan strategis sebagai dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan pengembangan visi misi keilmuan program studi di masa depan.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi ini dirancang untuk menilai secara komprehensif visi dan misi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara. Ruang lingkup evaluasi mencakup dua hal utama:

1. **Visi dan Misi Keilmuan:** Penilaian terhadap rumusan visi dan misi itu sendiri, termasuk kejelasan, relevansi, dan koherensinya.
2. **Implementasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi:** Penilaian sejauh mana visi dan misi tersebut telah diwujudkan dalam setiap aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Untuk memastikan hasil evaluasi yang holistik, pendekatan yang digunakan adalah model lima aspek, yaitu:

1. Relevansi: Analisis Kesesuaian visi keilmuan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan eksternal.
2. Koherensi: Penilaian konsistensi dan keselarasan antara visi keilmuan dengan seluruh komponen program studi.
3. Implementasi: Analisis terhadap keterkaitan visi dengan praktik implementasi program.
4. Evaluasi: Penilaian terhadap dampak jangka menengah dari lulusan.
5. Impact: Penilaian pengaruh dan kontribusi nyata dari visi dan misi keilmuan.

BAB II VISI MISI KEILMUAN

A. Visi Keilmuan

Adapun Visi Keilmuan Program Dokot Hukum Tata Negara IAIN Curup ialah:

“Sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dengan Spirit Kewirausahaan yang Kompetitif secara Nasional dan Global”.

B. Misi Keilmuan Prodi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan doktor Hukum Tata Negara secara Profesional
- 2) Melakukan pengkajian dan pengembangan bidang Ilmu Adminsitasi Pendidikan.
- 3) Menyelenggarakan layanan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang Ilmu Adminsitasi Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Menjalin kerjasama dan kemitraan baik nasional maupun global terutama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang ilmu Hukum Tata Negara.

C. Body of Knowledge Program Studi

Program studi Hukum Tata Negara mengembangkan Hukum Tata Negara melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga menghasilkan karya-karya novelty, kreatif, original dan teruji; memecahkan permasalahan dalam praktek Hukum Tata Negara melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, dan memimpin, mengelola, dan mengembangkan riset yang mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

D. Profil Lulusan

- 1) Inovator, yakni lulusan memiliki kemampuan menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya dari sistem kebudayaan bangsanya sendiri untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan paradigma pembangunan pendidikan nasional;
- 2) Peneliti, yakni lulusan memiliki kemampuan memimpin, mengelola, dan mengembangkan riset yang mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional, serta mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin termasuk kajian teoritis atau eksperimen pada bidang keilmuan Hukum Tata Negara; dan
- 3) Akademisi, yakni lulusan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan membina profesionalisme tenaga kependidikan dalam bidang Hukum Tata Negara, serta mampu berperan sebagai konsultan ahli bagi para peneliti yang mengembangkan penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara.

E. Capaian Pembelajaran

- 1) Setiap lulusan harus memiliki **sikap** sebagai berikut:
 - a) Mampu menunjukkan sikap religius dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala kegiatan dan aktivitas manajemen pendidikan.
 - b) Mampu menunjukkan sikap peduli dan bertanggungjawab atas pekerjaannya sebagai manejer pendidikan pada manajer puncak (menteri, dirjen, direktur, sesjen, rektor, dekan, dosen, kepala diklat dan inspektorat), manajer menengah (kepala dinas, pengawas, dan pengelola latihan), manajer pada level bawah (kepala sekolah, supervisor, penilik, pengawas dan pengelola pendidikan non formal), peneliti dan konsultan dalam bidang manajemen pendidikan di berbagai jalur, jenjang dan satuan pendidikan pada tingkat nasional maupun internasional.
 - c) Mampu menunjukkan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika dan falsafah bangsa
 - d) Mampu menunjukkan sikap konsisten dan sistimatis dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang manajemen pendidikan.
 - e) Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik manajemen pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
 - f) Mampu menunjukkan sikap disiplin, integritas dan taat pada hukum yang berlaku dalam mengelola pendidikan.
 - g) Mampu menunjukkan sikap loyal dan profesional sesuai dengan keahlian dalam bidang manajemen pendidikan untuk memperbaiki dan mengembangkan mutu pendidikan.
 - h) Mampu menunjukkan sikap ilmiah, yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma akademik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam mengelola pendidikan.
 - i) Mampu menunjukkan sikap jujur, sopan dan bekerjasama dalam bidang manajemen pendidikan untuk membangun bangsa dan negara.
 - j) Mampu menunjukkan sikap kritis, logis dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, baik dalam bidang *information technology* (IT), *management information systems* (MIS), *Infrastructure Information systems* (IIS), maupun *design Information system* (DIS) dalam pengembangan manajemen pendidikan.
 - k) Mampu menunjukkan orientasi pada efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pendidikan secara berkesinambungan.
 - l) Mampu menunjukkan sikap tanggap, akomodatif, inovatif dan kreatif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang manajemen pendidikan.
- 2) Setiap lulusan harus memiliki **Pengetahuan** (Kompetensi Keilmuan) sebagai berikut:

- a) Mampu menghasilkan konsep dan teori manajemen pendidikan yang dapat digunakan oleh manajer pendidikan, peneliti dan konsultan manajemen Pendidikan
 - b) Mampu memproyeksikan manajemen pendidikan di masa yang akan datang, yang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap dunia pendidikan.
 - c) Mampu menghasilkan konsep manajemen pendidikan yang bermutu.
 - d) Mampu menghasilkan penelitian dalam bidang manajemen pendidikan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara serta masyarakat global.
 - e) Mampu menghasilkan konsep-konsep perubahan dan inovasi yang didasarkan data riil di lapangan, informasi yang akurat dan pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan yang dimiliki manajer, peneliti dan konsultan.
 - f) Mampu menghasilkan konsep knowledge management dalam berbagai inovasi dalam manajemen pendidikan.
 - g) Mampu menghasilkan konsep-konsep dan teori-teori baru dalam bidang manajemen pendidikan melalui kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
- 3) Setiap lulusan harus memiliki **Keterampilan Umum** sebagai berikut:
- a) Mampu mengimplementasikan strategi manajemen pendidikan yang efektif.
 - b) Mampu menciptakan dan mengimplementasikan manajemen sistem informasi untuk menciptakan pendidikan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat
 - c) Mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
 - d) Mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dari berbagai lapisan untuk memberikan layanan dan informasi pendidikan melalui manajer-manajer pendidikan, peneliti dan konsultan manajemen pendidikan
 - e) Mampu menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota profesi dalam wadah Asosiasi Program Studi, Ikatan Sarjana Hukum Tata Negara, Forum Komunikasi Mahasiswa, dan alumni untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang Hukum Tata Negara.
 - f) Mampu menciptakan outcome dalam bentuk kinerja dan komitmen yang tinggi untuk mengelola pendidikan, baik pada tingkat strategic, tactical dan operational.
- 4) Setiap lulusan harus memiliki **Keterampilan Khusus** sebagai berikut:
- a) Mampu merancang dan merencanakan manajemen pendidikan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia dan internasional.

- b) Mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya dengan melibatkan mitra-mitra kerja di dalam maupun luar negeri.
- c) Mampu melakukan sharing knowledge dalam berbagai aktivitas manajemen pendidikan dalam bentuk, *tacit to tacit*, *tacit to explicit*, *explicit to tacit*, dan *explicit to explicit*.
- d) Mampu melakukan analisis kebutuhan dan pengambilan keputusan strategis dan kebijakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan. multi disiplin.
- e) Mampu menemukan dan merancang model-model dan aplikasi baru manajemen sistem informasi pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemimpin dan pengelola pendidikan.
- f) Mampu melakukan analisis, kajian dan menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan yang didasarkan pada aspek ekonomi pendidikan, politik, sosial dan budaya
- g) Mampu mengatur, membagi tugas, mengkoordinasikan sumberdaya pendidikan dengan melakukan perubahan dan pengembangan dalam bidang manajemen pendidikan.
- h) Mampu mempengaruhi, memberikan motivasi, memberdayakan team, mengkomunikasikan, mengelola konflik dan melakukan negoisasi dengan berbagai pihak (guru, masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat) dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
- i) Mampu memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pendidikan.

BAB II METODE EVALUASI

A. Kriteria Evaluasi

Evaluasi visi dan misi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara didasarkan pada empat kriteria utama untuk memastikan hasil yang holistik dan terukur. Setiap kriteria memiliki indikator kunci yang menjadi panduan dalam penilaian.

1. Relevansi Kriteria ini mengukur sejauh mana visi dan misi sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan eksternal.
 - a. Relevansi Eksternal. Kesesuaian visi dan misi dengan tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Relevansi Internal. Kesesuaian visi dan misi dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas serta Universitas.
2. Koherensi Kriteria ini menilai konsistensi dan keselarasan antara visi misi dengan seluruh komponen program studi.
 - a. Koherensi Program. Konsistensi antara visi dan misi dengan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan *body of knowledge* struktur kurikulum.
 - b. Koherensi tridarma. Keterkaitan antara visi misi dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Implementasi Kriteria ini mengevaluasi seberapa efektif visi dan misi telah diwujudkan dalam praktik.
 - a. Pemahaman visi-misi oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholders
 - b. Visi misi keilmuan Prodi sudah sejalan dengan seluruh proses pelayanan akademik dan administratif.
 - c. Visi misi keilmuan Prodi sudah tercermin dalam suasana akademik.
 - d. Prodi mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik.
 - e. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi visi keilmuan.
4. Dampak Kriteria ini mengukur pengaruh dan kontribusi nyata dari visi dan misi.
 - a. Dampak Lulusan: Kontribusi lulusan di dunia kerja, kepuasan pengguna lulusan, dan relevansi pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki.
 - b. Dampak Institusional: Peningkatan reputasi program studi, jumlah publikasi ilmiah, dan pencapaian akreditasi.

- c. Dampak Sosial: Kontribusi program studi dalam memecahkan masalah pendidikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

B. Metode

Evaluasi visi keilmuan prodi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data yang komprehensif dari berbagai sumber. Sistem sampling yang digunakan adalah *simple random sampling* dimana semua anggota populasi berpeluang sama dalam memberikan penilaian melalui angket yang diberikan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan perspektif dan persepsi dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai relevansi dan efektivitas visi misi keilmuan prodi.

C. Sumber Data

Evaluasi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Sumber data dikategorikan menjadi primer dan sekunder, yang berasal dari internal maupun eksternal program studi. Data Primer dikumpulkan langsung dari responden melalui survei daring yakni.

- a. Pimpinan prodi, dosen (termasuk dosen senior), dan mahasiswa.
- b. Alumni, pengguna lulusan dan stakholder lainnya.

Total Populasi Responden Prodi Hukum Tata Negara ialah sebanyak 35 orang terdiri dari Dosen 5 orang, Mahasiswa aktif 20 orang, dan alumni 10 orang. Karakteristik informan dan responden dipilih secara strategis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Survei disebarakan kepada seluruh dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan untuk mendapatkan data kuantitatif yang representatif mengenai persepsi dan penilaian mereka.

BAB III TEMUAN DAN HASIL EVALUASI

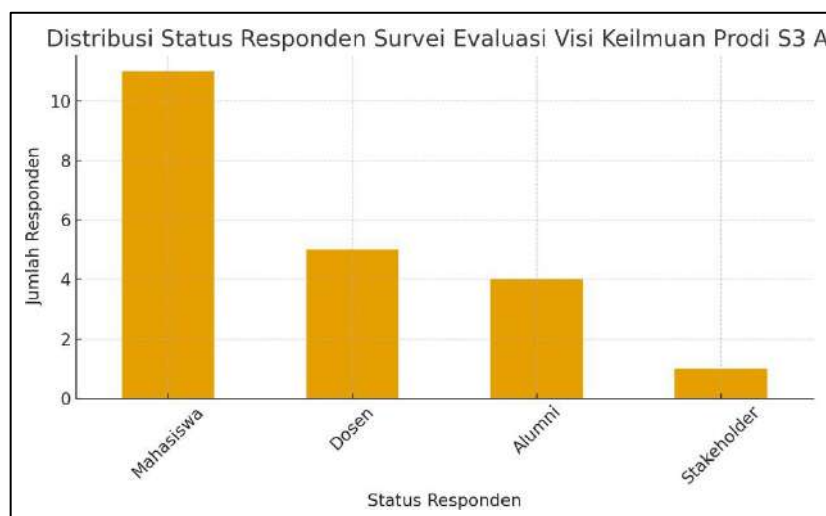
A. Karakteristik Reponden

Pengumpulan data survei dari total Populasi Responden Prodi Hukum Tata Negara ialah sebanyak 35 orang terdiri dari Dosen 5 orang, Mahasiswa aktif 20 orang, dan alumni 10 orang. Metode sampling yang digunakan adalah *simple random sampling* dimana semua anggota populasi berpeluang sama dalam memberikan penilaian melalui angket yang diberikan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan perspektif dan persepsi dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai relevansi dan efektivitas visi misi keilmuan prodi.

Tabel 3. 1 Distribusi status responden

Status Responden	Jumlah	Presentasi
Mahasiswa	11 orang	52%
Dosen	5 orang	24%
Alumni	4 orang	19%
Stakeholder lainnya	1 orang	5%
Total Responden	21 orang	100%
Populasi	35 Orang	60%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: (1) Responden terbanyak berasal dari mahasiswa (11 orang atau 52%), menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi kelompok utama dalam survei ini. (2) Dosen berjumlah 5 orang (24%) dan alumni 4 orang (19%). Hal ini penting karena pandangan dari kedua kelompok tersebut memberi perspektif dari sisi pengajar dan lulusan. (3) Terdapat 1 responden dari stakeholder luar (5%). Meski jumlahnya sedikit, keberadaan stakeholder eksternal menunjukkan adanya upaya menjaring masukan dari luar prodi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi ini sudah cukup baik karena melibatkan semua kelompok utama yakni dosen, mahasiswa, alumni, dan stakeholder.



Gambar 3. 1 Distribusi Karakteristik Responden

B. Sumber Informasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan

1. Informasi Visi Keilmuan

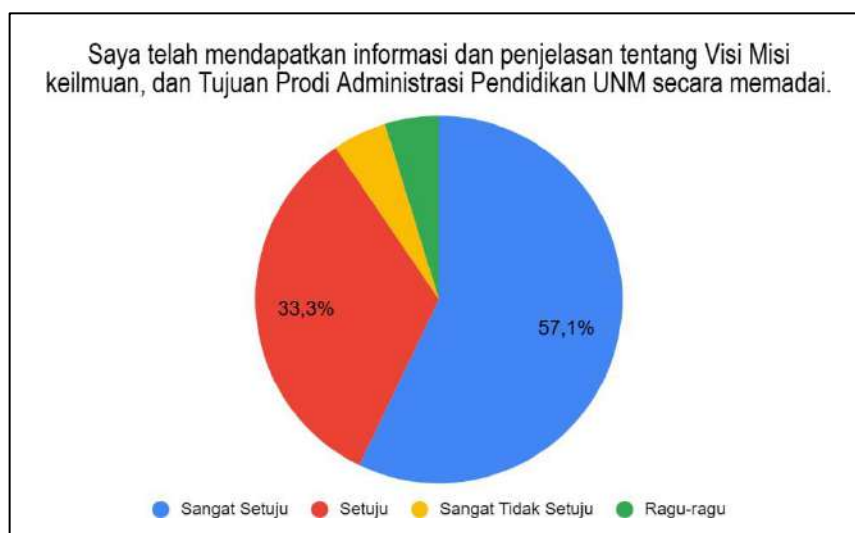
Terkait pertanyaan responden mengenai informasi dan penjelasan tentang visi-misi keilmuan, dan Tujuan Prodi Hukum Tata Negara yang dirperoleh secara memadai, diketahui bahwa rata-rata 4.36 (mendekati "Setuju–Sangat Setuju") Std deviasi 0.95 → variasi jawaban cukup tinggi (terdapat perbedaan pengalaman responden). Minimum 1 (Sangat Tidak Setuju) → terdapat responden yang merasa belum memperoleh informasi memadai.

Median & modus 5 (Sangat Setuju) → sebagian besar merasa sudah mendapatkan informasi memadai. Informasi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 2 Statistik deskriptif aspek informasi visi keilmuan yang memadai.

Aspek	Teoritis		Aktual			
	Rentang Skor	Median	Min	Max	St. Deviasi	Rerata
Informasi memadai	22-110	5	1	5	0,95	4,36

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa secara umum, **responden memperoleh informasi tentang visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara** secara memadai. Nilai median dan modus 5 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa telah mendapatkan informasi yang sangat memadai. Meskipun demikian, temuan ini tidak berlaku merata. Standar deviasi 0.95 yang tergolong tinggi, bersama dengan adanya nilai minimum 1, mengindikasikan adanya disparitas pengalaman. Ada responden yang merasa sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai visi-misi keilmuan perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara konsisten.



Gambar 3. 2 Infomasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negarayang memadai

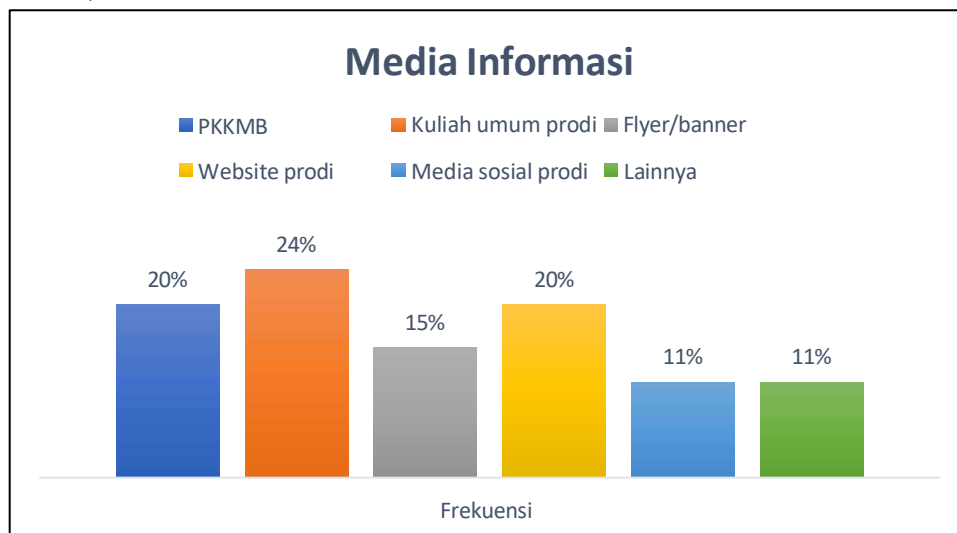
2. Media Informasi

Dari data responden, jumlah kemunculan masing-masing media/sumber informasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 3 Media Sumber Informasi Deskripsi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Media Infomasi	Frekuensi
PKKMB	20%
Kuliah umum prodi	24%
Flyer/banner	15%
Website prodi	20%
Media sosial prodi	11%
Lainnya	11%
Total	100%

Berdasarkan tabel di atas, analisis data menunjukkan bahwa frekuensi kuliah umum menjadi saluran paling efektif dalam menyampaikan visi keilmuan prodi, dengan persentase tertinggi sebesar 24%. Ini mengindikasikan bahwa interaksi tatap muka dan penjelasan langsung dalam acara-acara formal sangat berperan penting dalam komunikasi strategis program studi. Di posisi berikutnya, PKKMB dan website prodi memiliki efektivitas yang sama, masing-masing dengan 20%. Tingginya persentase ini menegaskan bahwa strategi komunikasi formal di awal perkuliahan dan ketersediaan informasi yang mudah diakses secara daring juga sangat krusial. Sementara itu, penggunaan media promosi cetak seperti flyer/banner masih cukup relevan, menyumbang 15% dari total penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa media konvensional masih memiliki daya jangkauan yang signifikan, terutama untuk audiens baru.



Gambar 3. 3 Frekuensi Media Informasi

Di sisi lain, media sosial dan sumber lainnya (seperti komunikasi informal atau *word-of-mouth*) menunjukkan persentase yang paling rendah, yaitu 11%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun prodi menggunakan media sosial, optimalisasi dan pemanfaatannya sebagai sumber informasi visi keilmuan belum maksimal. Selain itu,

tingginya angka 'lainnya' menunjukkan adanya kebutuhan atau kecenderungan responden untuk mendapatkan informasi dari saluran-saluran di luar media formal yang disediakan oleh prodi.

Secara ringkas, visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara paling efektif tersampaikan melalui acara-acara formal (kuliah umum dan PKKMB) dan platform digital resmi (website). Masih ada peluang besar untuk meningkatkan efektivitas media sosial sebagai kanal komunikasi utama.

3. Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan

Terkait pernyataan responden mengenai tingkat pemahaman visi-misi keilmuan, diketahui bahwa rata-rata 4.64 (mendekati "Sangat Setuju") Std deviasi 0.58 → jawaban lebih homogen, responden cenderung sepakat. Minimum 3 (Ragu-ragu) → masih ada sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya memahami. Median & modus: 5 (Sangat Setuju) → mayoritas merasa sudah memahami dengan baik.

Tabel 3. 4 Statistik deskriptif tingkat pemahaman visi keilmuan prodi.

Aspek	Teoritis			Aktual		
	Rentang Skor	Median	Min	Max	St. Deviasi	Rerata
Informasi memadai	22-110	5	3	5	0,58	4,64

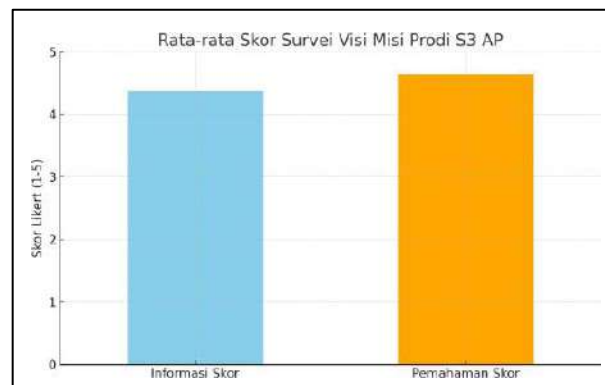
Berdasarkan tabel di atas secara umum, pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi-misi keilmuan prodi berada di tingkat yang sangat tinggi. Nilai median dan modus 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa sudah memahami dengan sangat baik, sementara nilai rata-rata 4.64 menegaskan konsensus positif ini. Tingkat pemahaman yang seragam ini juga dicerminkan dari standar deviasi 0.58 yang sangat rendah, mengindikasikan bahwa persepsi responden sangat homogen. Meskipun demikian, temuan adanya nilai minimum 3 mengingatkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam memastikan setiap individu, sekecil apa pun kelompoknya, dapat memiliki pemahaman yang sama baiknya.



Gambar 3. 4 Tingkat Pemahaman Visi Misi

4. Perbandingan Informasi vs Pemahaman

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap visi-misi keilmuan (rata-rata 4.64) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap ketersediaan informasi (rata-rata 4.36). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian responden merasa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya merata, mereka tetap berhasil menginternalisasi dan memahami visi misi prodi dengan baik. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya faktor pendukung lain di luar saluran komunikasi formal, seperti diskusi akademik, interaksi dengan dosen, atau pengalaman studi yang turut membentuk pemahaman.



Gambar 3. 5 Perbandingan Informasi yang terima dengan tingkat pemahaman visi keilmuan

Berdasarkan gambar tersebut diketahui pemahaman Visi keilmuan lebih tinggi daripada Informasi yang diterima. Artinya, pemahaman sudah cukup baik, dan aspek penyebaran informasi masih bisa ditingkatkan.

Catatan Temuan

1) **Kekuatan utama:**

- Informasi maupun pemahaman visi keilmuan prodi Mayoritas responden ($\geq 75\%$) berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini menandakan bahwa program sosialisasi visi keilmuan prodi sudah berjalan dengan baik.
- Stakeholder dan alumni umumnya memberikan skor tinggi, menandakan keberhasilan sosialisasi di luar lingkup internal mahasiswa.
- Prodi sudah menyediakan berbagai kanal informasi (PKKMB, kuliah umum, website, media sosial, banner), yang relatif beragam dan mencakup segmen audiens berbeda.
- Terdapat gap kecil dimana beberapa responden (terutama mahasiswa) masih merasa informasi yang diterima belum memadai (skor 1–3). Ini berarti masih terdapat tantangan pada pemerataan akses informasi, khususnya bagi mahasiswa.

2) **Tantangan:**

- Informasi masih terkonsentrasi pada mahasiswa baru (PKKMB, kuliah umum), sementara alumni dan stakeholder lebih mengandalkan website.

- Media sosial prodi belum optimal meski potensinya besar untuk menjangkau audiens luas.
- Keberadaan “media lainnya” menandakan masih ada jalur komunikasi informal yang mengisi celah dari kanal resmi.

3) Rekomendasi:

- a) Prodi Perlu memperkuat website-nya sebagai pusat informasi resmi yang selalu diperbarui.
- b) Prodi Perlu meningkatkan pemanfaatan media sosial prodi agar lebih interaktif dan menjangkau alumni/stakeholder.
- c) Integrasikan materi visi-misi ke dalam berbagai mata kuliah awal agar pemahaman mahasiswa lebih konsisten (misalnya melalui handbook, *running teks* pada bahan tayang dosen (ppt).
- d) Kurangi ketergantungan pada media cetak (flyer/banner) dan beralih ke media digital untuk efisiensi dan jangkauan lebih luas.

C. Analisis Relevansi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Kesesuaian visi dan misi dengan SN-Dikti, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat. Hasil pengolahan data survei evaluasi **visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara** menunjukkan skor rata-rata (skala Likert 1–5) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 5 Kesesuaian Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara yang Dirumuskan Secara Tepat

Aspek Kesesuaian	Rerata
Sesuai SN-Dikti	4,45
Menunjukkan Kekhasan Prodi	4,55
Berwawasan ke Depan	4,55
Relevan dengan Perkembangan IPTEKS	4,60
Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	4,45
Selaras dengan Visi Fakultas/Universitas	4,55

Berdasarkan Analisis data terdapat 3 kategori kecenderungan respon responden terhadap item ini. Tingkat kesesuaian visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara dengan beberapa aspek tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian Tinggi

Seluruh indikator berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi ($\geq 4,4$). Hal ini menunjukkan bahwa visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara dipersepsikan sudah sangat sesuai dengan standar mutu dan kebutuhan stakeholders.

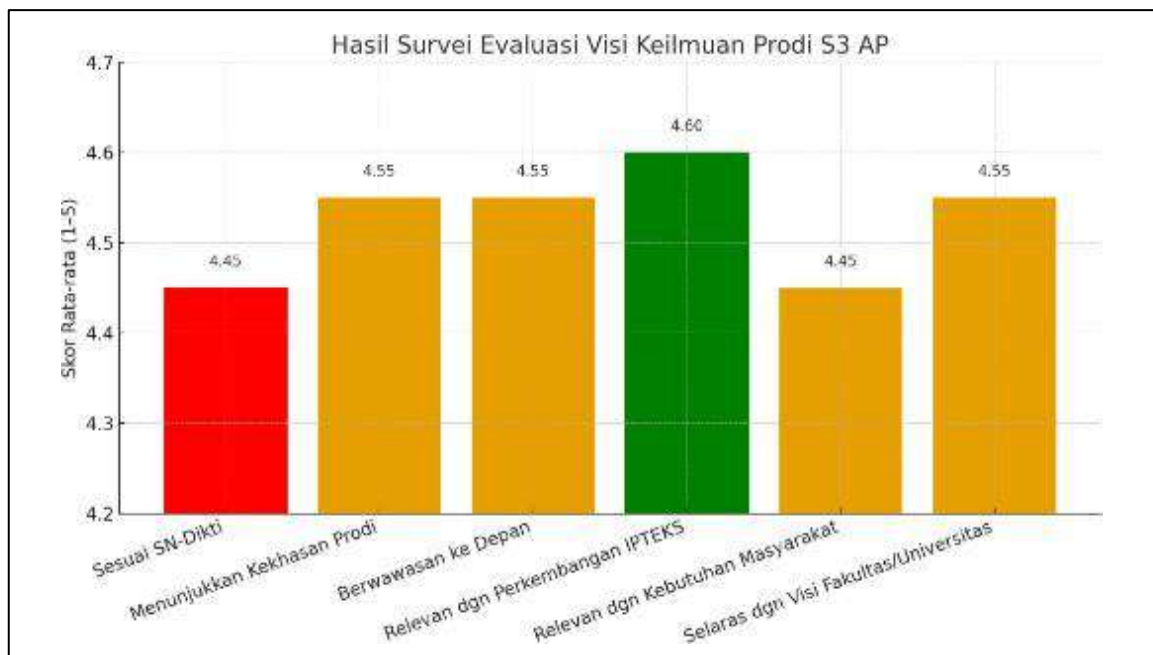
2. Aspek Terkuat

Dimensi relevansi dengan perkembangan IPTEKS (4,60) memperoleh skor tertinggi. Artinya, responden menilai visi prodi adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

3. Aspek Relatif Lemah

Skor paling rendah ada pada kesesuaian dengan SN-Dikti (4,45) dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat (4,45). Meski tetap tinggi, ini menunjukkan ada ruang untuk memperkuat keterhubungan visi dengan standar regulasi nasional dan kebutuhan riil masyarakat.

Berikut disajikan gambar grafik dari beberapa aspek kesesuaian dengan visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara



Gambar 3. 6 Grafik hasil analisis survei evaluasi visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara.

Berdasarkan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa Skor rata-rata semua indikator berada di kisaran 4,45 – 4,60, menunjukkan persepsi responden yang sangat positif. Kekuatan tertinggi ada pada indikator Relevansi dengan perkembangan IPTEKS (4,60). Area yang perlu perhatian meskipun masih sangat baik adalah Sesuai SN-Dikti dan Relevan dengan kebutuhan masyarakat (keduanya 4,45).

Catatan Temuan

1. Kekuatan utama.

- Visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara **sudah dirumuskan dengan tepat, jelas, dan konsisten** dengan regulasi, perkembangan IPTEKS, serta arah kelembagaan.
- **Kekhasan prodi, wawasan ke depan, dan integrasi dengan IPTEKS serta kesesuaian dengan visi universitas**, yang memperlihatkan identitas akademik yang kuat.

2. Tantangan.

- **Area perbaikan** dapat difokuskan pada penguatan **keterkaitan visi dengan SN-Dikti** (dengan mempertimbangkan kata kunci sesuai level KKNi)

- Area perbaikan pada relevansi dengan kebutuhan masyarakat (melalui riset kebutuhan pengguna lulusan dan program pengabdian masyarakat).

D. Analisis Koherensi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

1. Koherensi Visi Keilmuan Prodi dengan Tridarma PT

Konsistensi antara visi dan misi dengan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jumlah Responden pada item ini sebanyak 21 orang dengan 16 responden (76%) menyatakan sangat setuju bahwa visi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5 responden (24%) menyatakan Setuju.

Tabel 3. 6 Koherensi Visi Keilmuan Prodi terhadap tridarma PT

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju	16	76%
Setuju	5	24%
Ragu-ragu	0	0,0%
Tidak Setuju	0	0,0%
Sangat Tidak Setuju	0	0,0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Mayoritas responden memiliki persepsi yang sangat positif terhadap fungsi visi keilmuan program studi sebagai landasan utama dalam berbagai aspek tridarma perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa visi keilmuan telah dipahami, diinternalisasi, dan diakui relevansinya oleh sivitas akademika dan stakeholder. Persentase Setuju (24%) memperkuat bahwa tidak ada respon negatif, sehingga dapat dikatakan visi keilmuan sudah **efektif menjadi rujukan strategis**, meskipun peningkatan sosialisasi dan penguatan implementasi tetap diperlukan agar konsistensi semakin terjaga.



Gambar 3. 7 Koerensi Visi Keilmuan dengan Trdharma PT

E. Analisis Implementasi Visi Misi

Menyajikan data mengenai sejauh mana visi dan misi telah diimplementasikan dalam:

1. Acuan Kegiatan Akademik

Visi misi keilmuan Prodi merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Akademik di lingkungan Prodi. Berikut disajikan tanggapan responden terkait implementasi visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara:

Tabel 3. 7 Implementasi Visi Keilmuan Sebagai Acuan Kegiatan Akademik

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	15	71,4%
Setuju	6	28,6%
Ragu-ragu	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa sebagian besar responden (71,4%) menyatakan Sangat Setuju bahwa visi misi keilmuan Prodi merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik. Sebanyak 28,6% responden menyatakan Setuju. Tidak ada responden yang ragu-ragu maupun memberikan penilaian negatif.



Gambar 3. 8 Wujud Implementasi Visi Keilmuan dalam Kegiatan Akademik

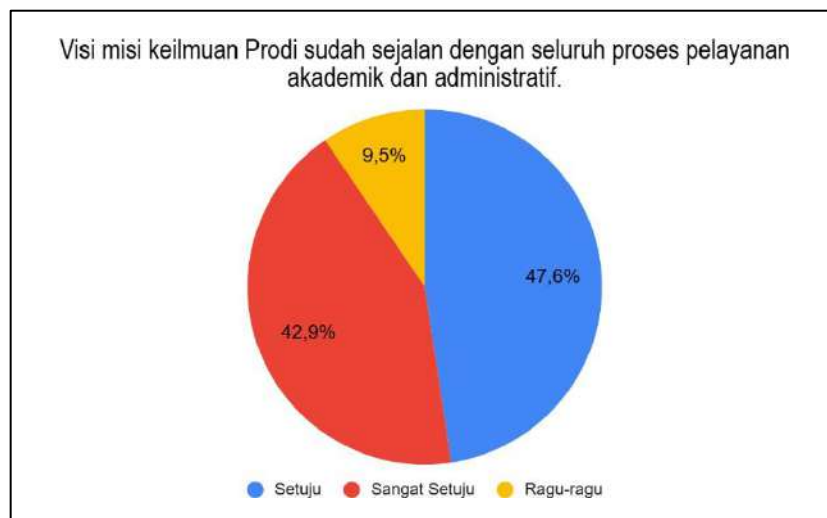
2. Visi keilmuan tercermin dalam proses pelayanan akademik dan administratif

Tanggapan responden terkait implementasi visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara sudah sejalan dengan seluruh proses pelayanan akademik dan administratif dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 8 Implementasi Visi Keilmuan Sebagai Acuan Kegiatan Akademik

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	9	42,86%
Setuju	10	47,62%
Ragu-ragu	2	9,52%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan Setuju (47,62%) bahwa visi misi keilmuan Prodi sudah sejalan dengan pelayanan akademik dan administratif. Sebanyak 42,86% responden bahkan memberikan penilaian yang lebih kuat, yaitu Sangat Setuju. Ada 9,52% responden yang masih Ragu-ragu. Tidak ada responden yang memberikan penilaian negatif. Interpretasi Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (90,48%) menilai visi misi Prodi sudah selaras dengan proses pelayanan akademik maupun administratif. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi visi misi tidak hanya tercermin dalam aspek akademik, tetapi juga terintegrasi ke dalam tata kelola administrasi. Namun, keberadaan responden yang ragu-ragu (9,52%) mengindikasikan bahwa masih ada area yang perlu diperkuat agar kesinambungan antara visi misi keilmuan dengan seluruh proses pelayanan dapat dirasakan lebih nyata dan konsisten oleh seluruh civitas akademika.



Gambar 3. 9 Visi Keilmuan Tercermin Dalam Proses Pelayanan Akademik Dan Administratif

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa visi misi keilmuan Prodi Hukum Tata Negaratelah berjalan selaras dengan praktik akademik dan administratif, meskipun tetap perlu penguatan agar semua pihak merasakan dampaknya secara penuh.

3. Visi keilmuan tercermin dalam suasana akademik

Tanggapan responden terkait implementasi visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negarasudah tercermin dalam suasana akademik. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 9 Implementasi Visi Keilmuan tercermin dalam suasana akademik

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	11	52,38%
Setuju	8	38,10%
Ragu-ragu	2	9,52%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden (52,38%) menyatakan Sangat Setuju bahwa visi misi keilmuan Prodi sudah tercermin dalam suasana akademik. Sebanyak 38,10% menyatakan Setuju. Hanya 9,52% responden yang Ragu-ragu. Tidak ada responden yang menilai negatif (Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju). Hasil ini mengindikasikan bahwa visi misi keilmuan Prodi Hukum Tata Negera telah berhasil diinternalisasikan dalam suasana akademik, terlihat dari mayoritas responden yang sangat mendukung (Sangat Setuju dan Setuju total 90,48%).

Namun, adanya 9,52% responden yang masih ragu-ragu menunjukkan bahwa meskipun visi misi sudah tercermin, ada sebagian kecil pihak yang merasa implementasinya belum sepenuhnya nyata atau konsisten di semua aspek akademik. Hal ini bisa menjadi masukan agar prodi memperkuat pencerminan visi misi dalam aktivitas akademik secara lebih merata, misalnya melalui kegiatan kolaboratif, integrasi penelitian, maupun atmosfer akademik yang lebih sesuai dengan arah visi keilmuan.



Gambar 3. 10 Visi Keilmuan Prodi tercermin dalam Suasana Akademik

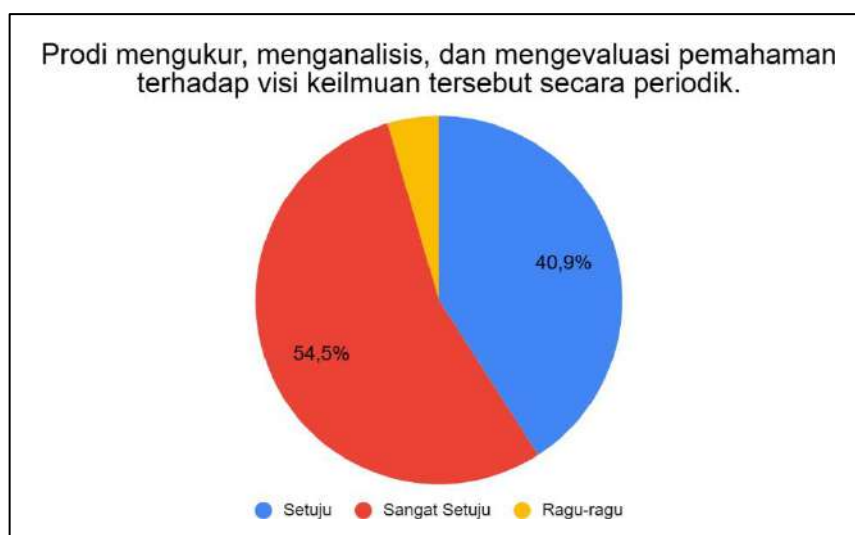
4. Evaluasi visi Keilmuan Prodi

Tanggapan responden terkait dengan pernyataan bahwa prodi mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik dapat di lihat dari tabel berikut.

Tabel 3. 10 Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	11	52,38%
Setuju	9	42,86%
Ragu-ragu	1	4,76%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kategori Sangat Setuju (52,38%). Sebanyak 42,86% responden memilih Setuju, sehingga total respon positif (Setuju + Sangat Setuju) mencapai 95,24%. Hanya 1 responden (4,76%) yang memilih Ragu-ragu, menunjukkan adanya sedikit ketidakpastian. Tidak ada responden yang menyatakan Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan prodi dinilai sudah diukur, dianalisis, dan dievaluasi secara periodik dengan sangat baik. Tingginya persentase dukungan (95,24%) menegaskan bahwa sistem evaluasi berkala ini telah dirasakan oleh mayoritas civitas akademika, alumni, maupun stakeholder. Kehadiran respon Ragu-ragu (4,76%) mengindikasikan bahwa masih ada sebagian kecil pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya merasakan atau mengetahui mekanisme evaluasi periodik yang dilakukan prodi.



Gambar 3. 11 Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Dengan demikian, hasil survei dapat diinterpretasikan bahwa **mekanisme evaluasi visi keilmuan dinilai berjalan baik dan konsisten**, namun perlu ditingkatkan sosialisasinya

agar semua pihak benar-benar menyadari keberadaan dan manfaat proses evaluasi tersebut.

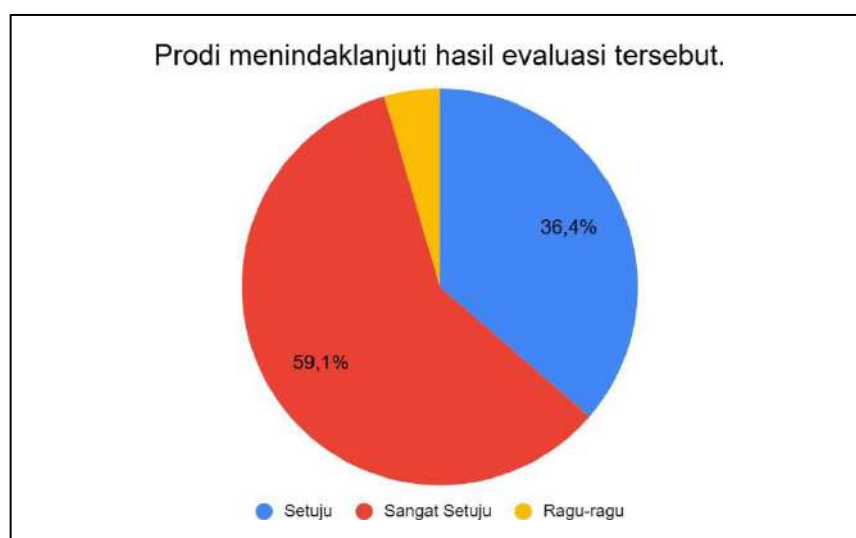
5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi

Tanggapan responden terkait dengan pernyataan bahwa prodi menindaklanjuti hasil evaluasi visi keilmuan dapat di lihat dari tabel berikut.

Tabel 3. 11 Tindak Lanjut Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	12	54,55%
Setuju	8	36,36%
Ragu-ragu	1	4,55%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	22	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kategori Sangat Setuju (54,55%). Sebanyak 36,36% responden menjawab Setuju. Total respon positif (Sangat Setuju + Setuju) mencapai 90,91%, menunjukkan dukungan yang sangat tinggi. Hanya 1 responden (4,55%) yang memilih Ragu-ragu. Tidak ada responden yang menyatakan Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas pemangku kepentingan (lebih dari 90%) meyakini bahwa Prodi Hukum Tata Negaramenindaklanjuti hasil evaluasi visi keilmuan yang dilakukan. Persentase dukungan yang tinggi memperlihatkan bahwa siklus evaluasi tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga diikuti oleh aksi nyata untuk perbaikan dan pengembangan prodi. Respon Ragu-ragu (4,55%) mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden mungkin belum merasakan secara langsung atau belum mendapat informasi yang cukup terkait tindak lanjut evaluasi yang dilakukan Prodi.



Gambar 3. 12 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Prodi Hukum Tata Negara dinilai responsif terhadap hasil evaluasi visi keilmuan, meskipun perlu peningkatan transparansi atau sosialisasi tindak lanjut agar seluruh pemangku kepentingan memiliki keyakinan yang sama.

F. Analisis Dampak Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Tanggapan responden terkait urgensi kebaruan Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Tindak Lanjut Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	19,05%
Setuju	6	28,57%
Ragu-ragu	6	28,57%
Tidak Setuju	5	23,81%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	21	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak berada pada kategori Setuju (28,57%) dan Ragu-ragu (28,57%), menunjukkan adanya keragaman pandangan. Sebanyak 19,05% responden menyatakan Sangat Setuju bahwa visi misi keilmuan Prodi perlu diperbaharui. 23,81% responden menyatakan Tidak Setuju, sehingga mereka menganggap visi misi saat ini masih relevan. Tidak ada responden yang memilih Sangat Tidak Setuju.

Hasil ini menggambarkan bahwa mayoritas responden (47,62%: Setuju + Sangat Setuju) menilai visi misi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara memang sudah saatnya diperbaharui agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kurikulum, serta kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat 23,81% responden yang menolak pembaruan, artinya mereka masih melihat visi misi yang ada cukup kuat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. 28,57% responden ragu-ragu, yang menunjukkan adanya ketidakpastian atau kurangnya pemahaman mendalam mengenai urgensi pembaruan visi misi.



Gambar 3. 13 Urgensi Pembaharuan Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan adanya **dukungan cukup kuat** terhadap **pembaruan visi keilmuan** Prodi Hukum Tata Negara, tetapi juga ada keraguan dan penolakan yang perlu ditangani dengan dialog akademik, sosialisasi, serta kajian yang lebih mendalam agar pembaruan visi misi benar-benar dipahami dan diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Daftar Temuan

1. Kesesuaian visi dengan arah pengembangan akademik

Mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa visi keilmuan Prodi telah menjadi rujukan utama dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan PkM.

2. Dukungan pemangku kepentingan

Tingginya persentase jawaban positif menunjukkan bahwa dosen, mahasiswa, alumni, dan stakeholder memiliki pemahaman yang sama terhadap relevansi visi Prodi.

3. Konsistensi implementasi

Visi keilmuan sudah cukup tercermin dalam suasana akademik dan praktik pembelajaran, meskipun sebagian kecil responden masih menunjukkan ragu-ragu.

4. Orientasi ke masa depan

Visi keilmuan dinilai relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, sehingga selaras dengan standar SN-Dikti dan visi kelembagaan.

Tantangan

1. Internalisasi visi

Masih terdapat sebagian kecil responden yang ragu-ragu atau belum sepenuhnya memahami bagaimana visi diterapkan dalam kegiatan akademik dan administratif.

2. Transparansi tindak lanjut evaluasi

Meski mayoritas menilai prodi menindaklanjuti hasil evaluasi, namun belum semua pemangku kepentingan merasakan dampaknya secara nyata.

3. Keterpaduan antar-tridharma

Masih diperlukan penguatan keterkaitan yang lebih eksplisit antara visi keilmuan dengan kegiatan penelitian dan PkM agar tidak hanya dominan di aspek kurikulum/pembelajaran.

4. Sosialisasi berkelanjutan

Informasi tentang visi, misi, dan arah pengembangan prodi masih belum merata diterima oleh semua stakeholder, khususnya mahasiswa baru, alumni, dan mitra eksternal.

Rekomendasi

1. Penguatan integrasi visi keilmuan

Memastikan setiap dokumen kurikulum, RPS, dan kegiatan penelitian maupun PkM secara eksplisit mencantumkan keterkaitan dengan visi keilmuan Prodi.

2. Mekanisme evaluasi periodik yang lebih inklusif

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam forum evaluasi berkala agar tindak lanjut lebih transparan dan dapat dirasakan langsung.

3. Strategi komunikasi yang lebih efektif

Memperluas sosialisasi visi-misi melalui media digital (website, media sosial, newsletter) dan forum akademik agar pemahaman semakin merata.

4. Pemetaan kontribusi tridharma

Menyusun matriks keterkaitan visi keilmuan dengan aktivitas tridharma untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ke stakeholder.

5. Peningkatan sinergi riset dan PkM

Mengarahkan penelitian disertasi, publikasi, dan program PkM agar lebih selaras dengan visi keilmuan, sehingga berdampak nyata pada pengembangan ilmu dan masyarakat.

G. Pembahasan Temuan (Analisis SWOT)

Berikut disajikan Analisa hasil temuan secara mendalam untuk mengidentifikasi **Kekuatan (Strengths)**, **Kelemahan (Weaknesses)**, **Peluang (Opportunities)**, dan **Ancaman (Threats)** terkait visi misi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara. Dengan menggunakan analisis SWOT, hasil temuan dari evaluasi visi keilmuan dapat dikategorikan secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan prodi untuk tidak hanya memahami kondisinya saat ini, tetapi juga merumuskan strategi yang terarah, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, sambil mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

1. Identifikasi SWOT Terkait Temuan Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Mayoritas responden ($\geq 75\%$) menyatakan **sangat setuju** bahwa informasi dan pemahaman visi keilmuan prodi sudah memadai (rerata 4,36–4,64). Hal ini menunjukkan efektivitas internalisasi visi.
- 2) Tingginya **koherensi visi dengan tridharma PT** (76% sangat setuju, 24% setuju) serta implementasi dalam kegiatan akademik (71,4% sangat setuju; 28,6% setuju) menandakan visi misi benar-benar menjadi rujukan dalam praktik akademik.
- 3) **Kanal informasi beragam** (PKKMB, kuliah umum, website, media sosial, flyer/banner) memungkinkan akses lebih luas kepada mahasiswa, alumni, dan stakeholder.
- 4) Visi keilmuan dinilai **relevan dengan perkembangan IPTEKS** (skor tertinggi 4,60) serta selaras dengan visi fakultas/universitas, memperlihatkan identitas akademik yang kuat dan berwawasan ke depan.

- 5) Prodi melakukan **evaluasi periodik dan tindak lanjut** terhadap visi misi, dengan dukungan positif $\geq 90\%$ responden, menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Masih terdapat sebagian kecil responden yang merasa **informasi belum memadai** (skor minimum 1), menandakan adanya disparitas dalam penyebaran informasi.
- 2) **Media sosial prodi belum optimal** (hanya 11%), padahal berpotensi besar menjangkau audiens lebih luas, khususnya generasi digital dan stakeholder eksternal.
- 3) **Keterpaduan tridharma** belum sepenuhnya kuat; visi lebih dominan tercermin dalam aspek kurikulum/pembelajaran, sementara penguatan di penelitian dan pengabdian masyarakat masih diperlukan.
- 4) **Sebagian responden ragu-ragu (9–10%)** terkait implementasi visi dalam pelayanan akademik, suasana akademik, dan evaluasi, mengindikasikan masih ada kelompok yang belum merasakan dampak nyata.
- 5) **Transparansi tindak lanjut hasil evaluasi** belum sepenuhnya dirasakan semua stakeholder, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan tertentu.

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Kebijakan **SN-Dikti dan MBKM** membuka ruang penguatan visi keilmuan agar lebih selaras dengan kerangka regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Perkembangan **teknologi digital** (website, media sosial, e-learning) dapat dimanfaatkan untuk memperluas sosialisasi dan internalisasi visi misi.
- 3) **Dukungan stakeholder eksternal** (meski jumlahnya kecil) menunjukkan adanya potensi kolaborasi dan penyelarasan visi dengan kebutuhan dunia kerja.
- 4) **Perkembangan IPTEKS** yang cepat menjadi peluang untuk memperbaharui visi misi agar tetap adaptif dan relevan dengan tren global.
- 5) Tingginya tingkat pemahaman dan penerimaan stakeholder menjadi modal sosial untuk melakukan **pembaruan visi misi** jika diperlukan.

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) **Perubahan regulasi pendidikan tinggi** berpotensi menuntut penyesuaian cepat terhadap rumusan visi misi.
- 2) **Persaingan antarprogram studi sejenis** dapat mengurangi daya saing jika prodi tidak mampu mempertahankan kekhasan visi keilmuannya.
- 3) Tingginya **ketergantungan pada media formal (kuliah umum, PKKMB)** berisiko membuat alumni dan stakeholder eksternal kurang terjangkau bila tidak diimbangi kanal digital yang kuat.

- 4) **Keragaman persepsi tentang urgensi pembaruan visi misi** (hanya 47,62% setuju, 28,57% ragu-ragu, 23,81% tidak setuju) berpotensi menimbulkan resistensi dalam proses revisi.
- 5) Jika **evaluasi dan tindak lanjut** tidak disosialisasikan secara transparan, prodi berisiko kehilangan kepercayaan sebagian stakeholder.

2. Matriks SWOT Temuan Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Tabel 3. 13 Matriks SWOT Temuan Hasil Evaluasi Visi Keilmuan Prodi Hukum Tata Negara

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Mayoritas responden memahami visi dengan baik ($\geq 75\%$ sangat setuju).	Sebagian kecil responden merasa informasi belum memadai.	Kebijakan SN-Dikti dan MBKM memberi peluang penguatan visi.	Perubahan regulasi pendidikan tinggi menuntut penyesuaian cepat.
Visi konsisten menjadi acuan tridharma (kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian).	Media sosial prodi belum optimal (11%).	Perkembangan teknologi digital untuk sosialisasi dan internalisasi visi.	Persaingan antarprodi sejenis mengurangi daya saing jika tidak ada kekhasan.
Kanal informasi beragam (PKKMB, kuliah umum, website, flyer, media sosial).	Keterpaduan tridharma belum merata (penelitian & pengabdian perlu diperkuat).	Dukungan stakeholder eksternal membuka ruang kolaborasi.	Ketergantungan pada media formal (kuliah umum, PKKMB) berisiko membatasi jangkauan.
Visi relevan dengan IPTEKS dan sejalan dengan visi universitas/fakultas.	9–10% responden masih ragu-ragu terkait implementasi.	Perkembangan IPTEKS menuntut pembaruan visi yang adaptif.	Perbedaan persepsi tentang urgensi pembaruan visi misi (23,81% tidak setuju).
Prodi melakukan evaluasi periodik dan tindak lanjut hasil evaluasi.	Transparansi tindak lanjut evaluasi belum sepenuhnya dirasakan.	Tingginya pemahaman stakeholder menjadi modal sosial untuk revisi visi.	Kurangnya transparansi tindak lanjut dapat menurunkan kepercayaan stakeholder.

3. Strategi Turunan dari Analisis SWOT

a. Strategi SO (*Strengths – Opportunities*)

Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- 1) Mengintegrasikan visi keilmuan yang sudah kuat ke dalam kurikulum berbasis OBE dan SN-Dikti.
- 2) Memperluas sosialisasi visi melalui pemanfaatan teknologi digital (website, e-learning, media sosial) untuk menjangkau stakeholder lebih luas.
- 3) Mengembangkan kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat berbasis visi dengan stakeholder eksternal.

b. Strategi WO (*Weaknesses – Opportunities*)

Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- 1) Mengoptimalkan media sosial prodi sebagai kanal utama sosialisasi visi agar lebih inklusif.
- 2) Mengaitkan pembaruan visi dengan perkembangan IPTEKS untuk mengurangi keraguan sebagian stakeholder.
- 3) Menyusun panduan implementasi visi dalam tridharma untuk mengurangi kesenjangan antar bidang (kurikulum, penelitian, pengabdian).

3. Strategi ST (*Strengths – Threats*)

Menggunakan kekuatan internal untuk mengantisipasi ancaman eksternal.

- 1) Menegaskan kekhasan prodi dalam visi keilmuan agar tetap kompetitif dengan prodi sejenis.
- 2) Memperkuat sistem evaluasi periodik visi untuk menghadapi dinamika regulasi pendidikan tinggi.
- 3) Menjaga konsistensi relevansi visi dengan IPTEKS agar tidak tertinggal dari perkembangan global.

4. Strategi WT (*Weaknesses – Threats*)

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- 1) Meningkatkan transparansi dan publikasi hasil evaluasi agar kepercayaan stakeholder tidak menurun.
- 2) Menyusun program workshop / FGD visi keilmuan untuk membangun komunikasi dua arah antara prodi dan stakeholder sehingga mengurangi perbedaan persepsi terkait urgensi pembaruan visi.
- 3) Mengurangi ketergantungan pada media formal (PKKMB, kuliah umum) dengan memperluas kanal komunikasi berbasis digital yang lebih adaptif.

Dengan strategi turunan ini, Prodi Hukum Tata Negaramemiliki arah tindak lanjut praktis yang bisa dijadikan bahan dalam Rencana Pengembangan Prodi atau dokumen evaluasi akreditasi.

4. Sintesis Pembahasan

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara telah:

- a. Dirumuskan dengan jelas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS dan arah kelembagaan.
- b. Dipahami dan diinternalisasi dengan baik oleh mayoritas pemangku kepentingan, terbukti dari tingginya skor rata-rata ($\geq 4,36$).
- c. Diimplementasikan konsisten dalam tridharma PT, namun masih perlu penguatan pada aspek penelitian dan pengabdian.

Namun, kelemahan dalam pemerataan informasi, transparansi tindak lanjut evaluasi, serta pemanfaatan media digital perlu segera diatasi. Selain itu, adanya keragaman pandangan tentang pembaruan visi misi menuntut prodi untuk melakukan kajian akademik yang inklusif agar keputusan revisi benar-benar didukung seluruh stakeholder. Dengan memanfaatkan peluang eksternal dan mengantisipasi ancaman, prodi dapat memperkuat keunggulan kompetitif dan menjaga relevansi visi misi dalam jangka panjang.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Relevansi dan Kejelasan Visi Keilmuan**

Visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara telah dirumuskan dengan jelas, sesuai dengan standar nasional (SN-Dikti), serta menunjukkan kekhasan bidang ilmu Hukum Tata Negara. Mayoritas responden (lebih dari 80%) menyatakan sangat setuju bahwa visi tersebut dipahami dengan baik, selaras dengan visi kelembagaan, serta relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

2. **Implementasi dalam Akademik dan Administratif**

Visi misi keilmuan telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari tingkat kesepakatan tinggi responden bahwa visi misi sudah sejalan dengan kegiatan akademik dan pelayanan administratif di lingkungan Prodi.

3. **Pemahaman Pemangku Kepentingan**

Sebagian besar dosen, mahasiswa, alumni, dan stakeholder menyatakan telah memperoleh informasi dan penjelasan tentang visi misi keilmuan melalui berbagai media (PKKMB, kuliah umum, website prodi, media sosial, dan banner/flyer). Hal ini menunjukkan strategi sosialisasi visi sudah berjalan efektif, meskipun masih terdapat responden yang ragu-ragu atau merasa perlu perbaikan dalam penyebaran informasi.

4. **Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Prodi secara periodik melakukan evaluasi terhadap pemahaman pemangku kepentingan tentang visi keilmuan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Namun, sebagian kecil responden masih menilai bahwa proses evaluasi dan tindak lanjut perlu ditingkatkan agar lebih komprehensif, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik.

5. **Kebutuhan Pembaruan Visi**

Meskipun sebagian besar responden menyatakan visi keilmuan masih relevan, terdapat sekitar 20–25% responden yang ragu-ragu atau menilai visi perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara telah relevan, dipahami dengan baik, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan akademik maupun administratif**. Namun, perlu dilakukan **peningkatan dalam evaluasi berkala, mekanisme tindak lanjut, serta pembaruan visi keilmuan** agar senantiasa responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan kebutuhan stakeholder.

B. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka disusun beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat visi keilmuan Prodi Hukum Tata Negara:

1. Peningkatan Sosialisasi Visi Keilmuan

- a. Memperluas jangkauan sosialisasi visi misi melalui pemanfaatan berbagai media digital (website, media sosial, e-brochure, video profil) dan forum akademik.
- b. Menyediakan materi sosialisasi yang sederhana, ringkas, namun komprehensif agar mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa baru, alumni, dan mitra eksternal.

2. Penguatan Implementasi Visi dalam Kurikulum dan Pembelajaran

- a. Memastikan setiap mata kuliah, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan visi keilmuan Prodi.
- b. Mengembangkan RPS dan model pembelajaran yang berbasis riset, inovasi, serta problem solving sesuai arah visi keilmuan.

3. Evaluasi dan Monitoring Berkala

- a. Menetapkan mekanisme evaluasi periodik (misalnya setiap semester atau tahunan) terkait implementasi visi misi keilmuan.
- b. Menyusun instrumen evaluasi standar yang dapat mengukur pemahaman dan implementasi visi keilmuan di seluruh lini akademik dan administratif.
- c. Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi serta tindak lanjutnya agar dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

4. Pembaruan Visi secara Responsif

- a. Melakukan kajian secara berkala untuk meninjau relevansi visi keilmuan dengan perkembangan IPTEKS, kebijakan pendidikan nasional, dan kebutuhan masyarakat global.
- b. Mengikutsertakan dosen, mahasiswa, alumni, dan stakeholder eksternal dalam proses pembaruan visi agar menghasilkan visi yang inklusif, visioner, dan adaptif.

5. Penguatan Kolaborasi dan Jejaring

- a. Meningkatkan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional guna memperkaya perspektif visi keilmuan.
- b. Mengoptimalkan peran alumni dan stakeholder dalam memberikan masukan serta mendukung penguatan implementasi visi misi di berbagai aspek akademik dan pengembangan kelembagaan.

LAMPIRAN

A. Kisi Kisi & Angket survei (Instrumen Evaluasi Visi Keilmuan Prodi)

Kriteria	Indikator Kunci	Bentuk Instrumen	Skala/Respon
Relevansi	Kesesuaian visi dan misi dengan perkembangan IPTEKS	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Keterkaitan visi dan misi dengan kebutuhan stakeholders (mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, masyarakat)	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Kesesuaian visi dan misi dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas serta Universitas.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
Koherensi	Konsistensi antara visi dan misi dengan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan <i>body of knowledge</i> struktur kurikulum.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Keterkaitan antara visi misi dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
Implementasi	Pemahaman visi-misi oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholders	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Visi misi keilmuan Prodi sudah sejalan dengan seluruh proses pelayanan akademik dan administratif.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Visi misi keilmuan Prodi sudah tercermin dalam suasana akademik.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
Evaluasi	Prodi mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
	Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi visi keilmuan.	Pernyataan tertutup	Likert 1–5 (STS–SS)
Dampak	Kontribusi lulusan di dunia kerja, kepuasan pengguna lulusan, dan relevansi pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki.	Tracers Studi	Survei
	Peningkatan reputasi program studi, jumlah publikasi ilmiah, dan pencapaian akreditasi.	Dokumen Akreditasi & Publikasi	Studi Dokumentasi
	Kontribusi program studi dalam memecahkan masalah pendidikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.	FGD	Wawancara terstruktur

Instrumen Evaluasi Visi, Misi, dan Keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara

Instrumen ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pemahaman, relevansi, dan implementasi visi, misi, serta keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar pengembangan berkelanjutan dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi.

Identitas Responden

Nama (opsional):

Status Responden:

☐ Dosen ☐ Pegawai ☐ Mahasiswa

Program Studi/Jenjang: ☐ S1 ☐ S2 ☐

Tanggal: ____ / ____ / ____

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan berikut sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan, dengan menggunakan skala berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Instrumen Evaluasi

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya telah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang Visi, Misi keilmuan, Tujuan, dan Sasaran Prodi Hukum Tata Negara secara memadai.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Media atau sumber tempat memperoleh informasi/penjelasan tentang Visi, Misi, keilmuan Prodi Hukum Tata Negara (1) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), (2) Rapat Prodi, (3) Kuliah umum prodi, (4) Flyer/banner, (5) Website prodi, (6) Media sosial prodi, (7) Lainnya.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Prodi Hukum Tata Negara memiliki visi keilmuan yang dirumuskan: (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c)	☐	☐	☐	☐	☐

	berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS					
--	---	--	--	--	--	--

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
	dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.					
4	Visi, misi, keilmuan Prodi saya pahami dengan baik.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Visi keilmuan PS menjadi rujukan; pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Visi, misi, keilmuan Prodi merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Akademik di lingkungan Prodi.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Visi, misi, keilmuan Prodi sudah tercermin dalam suasana akademik.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Visi, misi, keilmuan Prodi sudah sejalan dengan seluruh proses pelayanan akademik dan administratif.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Visi, misi, keilmuan Prodi yang ada saat ini perlu dirubah.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Prodi mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Visi keilmuan Prodi memiliki kelebihan dan kelemahan.					

(Tuliskan kelebihan dan kelemahan di bawah ini).

Kelebihan visi dan misi Prodi Hukum Tata Negara:

.....

.....

Kelemahan visi dan misi Prodi Hukum Tata Negara:

.....

.....

B. Hasil Validasi Instrumen.

REABILITAS INSTRUMEN

Scale Reliability Statistics

Cronbach's α	
scale	0.905

Nilai 0,905 berarti instrumen Anda sangat reliabel, dengan konsistensi internal yang sangat tinggi. Artinya, responden cenderung menjawab tiap aitem dengan pola yang konsisten karena semua aitem benar-benar mengukur aspek yang sama. Aitem 14 hanya perlu direvisi, karena jika aitem digugurkan dan dilakukan analisis ulang terkait reabilitas, maka reabilitasnya hanya meningkat sebesar 2% (0,02). Sehingga aitem 14 tetap digunakan, namun dengan syarat perlu direvisi.

ANALISIS AITEM

AITEM	VALIDASI	P-VALUE	KATEGORI	KETERANGAN
aitem01	0.444	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem03	0.749	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem04	0.792	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem05	0.777	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem06	0.8	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem07	0.815	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem08	0.677	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem09	0.772	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem10	0.696	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem11	0.622	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem12	0.765	< .001	Sangat Kuat	Dapat digunakan
aitem13	0.742	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem14	0.335	0.013	Lemah	Dapat digunakan namun perlu revisi
aitem15	0.652	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem16	0.644	< .001	Moderat	Dapat digunakan
aitem17	0.492	< .001	Moderat	Dapat digunakan

- **Kategori Sangat Kuat:** memiliki validitas tinggi sehingga sangat baik digunakan. Aitem-aitem ini benar-benar merepresentasikan konstruk yang diukur.
- **Kategori Moderat:** validitas cukup, masih dapat digunakan, tetapi kontribusinya tidak sekuat aitem dengan kontribusi lebih besar dari 75%. Aitem ini tetap layak dipertahankan karena signifikan, meskipun bisa dipertimbangkan revisi redaksi jika ingin memperkuat validitas.
- **Kategori Lemah:** Aitem14 ($r = 0,335$, $p = 0,013$) validitas paling rendah dan signifikansi lebih kecil dibanding aitem lain. Walaupun masih di atas batas minimum (0,30), aitem ini lemah. Kesimpulan tabel menunjukkan aitem14 dapat digunakan namun sebaiknya direvisi agar lebih jelas, relevan, dan mampu menangkap konstruk yang sama dengan aitem lainnya. Walaupun p value belum lebih kecil dari 0,001, namun tetap masih digunakan dengan margin error (kesalahan pengukuran) pada 5% (0,05). Maka dari itu aitem 14 **direvisi** agar mampu meningkatkan kontribusi aitem terhadap konstruk yang diukur.